

BADAN PENGHUBUNG

**LAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2019**

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, cepat dan ke arah pemerintahan kelas dunia dapat diselesaikan.

Reformasi birokrasi telah menjadi agenda kerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang sudah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Terima kasih dan apresiasi yang setingginya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat aktif dalam penyusunan dokumen peta jalan reformasi birokrasi ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua.

Pangkalpinang, Januari 2020

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



ARIE PRIMAJAYA, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19751231 200312 1 007

HASIL PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kinerja birokrasi antara lain dengan merumuskan tugas pokok pemerintahan yang baik sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sehingga tidak terjadi konflik antara masyarakat dengan masyarakat, atau antara masyarakat dengan pemerintah.
2. Menyediakan semua kebutuhan dasar bagi individu dan masyarakat. Pangan, papan, dan sandang, harus senantiasa tersedia dengan harga yang terjangkau oleh setiap individu.
3. Mencerdaskan individu dan masyarakat secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut agar dapat menjalani kehidupannya secara penuh dan bermanfaat.
4. Memperhatikan, memelihara, dan memberdayakan individu, masyarakat yang lemah, terlantar, terpinggirkan, dan tak berdaya.
5. Melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup.

Yang semuanya telah dijabarkan dalam program/kegiatan dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahannya dengan melakukan reformasi birokrasi dan menetapkan menjadi salah satu prioritas pembanguna, dalam mewujudkan Misi ke-5 RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yaitu : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi**, yang dijabarkan dengan tujuan sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung”

Sejalan dengan visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada beberapa hal yang akan dilaksanakan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendampingan keprotokolan dan kehumasan;
- b. Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya Bangka Belitung di Jakarta/Luar Jakarta;
- c. Meningkatkan Kualitas Hubungan Antar Pemerintah dan Lembaga lainnya, serta melakukan Pembinaan terhadap Pelajar, Mahasiswa dan Kelompok/Organisasi Masyarakat Bangka Belitung di Jabodetabek dan daerah lainnya;

❖ Kebijakan

- Penyelenggaraan Keprotokolan dan Pelayanan Tamu serta Pimpinan Daerah sesuai dengan SOP;
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- Melakukan Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik;
- Meningkatkan Keindahan Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Meningkatkan Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Penyusunan Informasi Promosi;
- Meningkatkan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat;
- Meningkatkan Peran Hubungan Antar Lembaga.

Tabel 1
Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2019
Badan Penghubung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

N o.	Sasaran	Area Perubah an	Prioritas Kegiatan	Target				Penanggung Jawab	Keterangan	
				T W 1	T W 2	T W 3	T W 4			
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Manajemen perubahan	1	Pembentukan dan updating Tim RB (Pokja PMPRB, Tim Asesor PMPRB) RB					Koordinator Manajemen perubahan	SK NOMOR : 188.44/019/PEN GHUBUNG Tentang PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
			2	Sosialisasi <i>Road Map</i> /Rencana Kerja RB						
			3	Pelaksanaan RB secara mandiri						
			4	Pendokumentasian Reformasi Birokrasi						
			5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB						
			6	mendorong perubahan pola pikir						
		Penguatan Pengawasan	1	Monitoring dan evaluasi pengelolaan gratifikasi oleh Tim secara berkala serta pemantauan LHKPN dan LHKASN					Koordinator Penguatan Pengawasan	
			2	Pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal untuk memperoleh WBK/WBBM						
			3	Pembangunan Zona Integritas secara intensif						
		Penguatan Akuntabilitas	1	Melibatkan pimpinan dalam penyusunan Renstra, Renja, PK					Koordinator Penguatan Akuntabilitas	
2	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja oleh pimpinan langsung secara berkala									
3	Pelaksanaan pelaporan akuntabilitas kinerja berbasis elektronik									
2	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Penataan dan Penguatan Organisasi	1	Monitoring dan evaluasi kinerja organisasi sampai dengan tingkat eselon IV					Koordinator Penataan dan Penguatan Organisasi	
		Penataan tatalaksana	1	Melakukan internalisasi Peta Proses Bisnis, Peta Lintas Fungsi, SOP Makro dan SOP Mikro serta monitoring dan					Koordinator Penataan tatalaksana	

N	Sasaran	Area	Prioritas Kegiatan		Target				Penanggung	Keterangan
			evaluasi lapangan							
		Penataa n Sistem Manaje men SDM	1	Penyusunan kebutuhan pegawai Badan Penghubung sesuai kebutuhan unit kerja					KoordinatorP enataan Sistem Manajemen SDM	SK NOMOR : 188.44/019/PEN GHUBUNG Tentang PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
			2	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi						
			3	Penerapan penetapan kinerja pegawai dan monev penilaian SKP secara berkala						
			4	Penegakan aturan/disiplin/ko de etik pegawai dan monev-nya secara berkala						
			5	Implementasi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)						
			6	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen ASN						
		Penataa n Peratur an Perund ang- undang an	1	Pelaksanaan, identifikasi, analisis dan pemetaan, penyempurnaan peraturan perundang- undangan yang tidak sinkron/relevan/dis harmonisasi					Koordinator Penataan Peraturan Perundang- undangan	
3	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Pelaksanaan standar pelayanan dan perbaikannya					Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
2			Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima							
3			Pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat							
4			Peningkatan pelayanan public dengan inovasi pelayanan public yang memanfaatkan teknologi informasi secara optimal							
			Progr am percepatan RB/ Quick Wins	1	Menyusun usulan penetapan unit kerja quick wins					

Pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Penghubung yang telah Dlakukan antara lain :

1. Mengidentifikasi hal-hal yang sudah dicapai dan berjalan dengan baik. Langkah-langkah yang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah berjalan dengan baik adalah melalui pemeliharaan bahkan secara terus menerus diperbaiki/ditingkatkan;
2. Mengidentifikasi permasalahan yang masih ditemukan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mencari solusi melalui program-program yang relevan dengan Reformasi Birokrasi Nasional;
3. Sebagai acuan untuk melaksanakan reencana aksi reformasi birokrasi dengan Mengidentifikasi kondisi yang diharapkan bagi organisasi dimasa mendatang. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun tahapan perencanaan dan implementasinya secara terstruktur melalui program-program, atau melalui langkah-langkah inovasi.

Adapun program-program pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai acuan dan langkah pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

Tujuan dari program ini adalah untuk mengelola perubahan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja birokrasi secara sistematis dan konsisten, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil yang diharapkan dan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program ini, antara lain adalah:

Hasil yang diharapkan	Kriteria Keberhasilan
1. Meningkatnya komitmen dalam melakukan reformasi birokrasi	Tercapainya Indikator Kinerja : Tercapainya Indek Reformasi Birokrasi
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya	
kerja (mental) birokrasi di setiap instansi	
Pemerintah	
3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan	
kemungkinan timbulnya resistensi terhadap	
Perubahan	
4. Mengimplementasikan Revolusi	

b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik maupun bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini, antara lain adalah:

Hasil yang diharapkan	Kriteria Keberhasilan
1. Meningkatnya sinergi dalam proses harmonisasi peraturan perundang-Undangan	Tercapainya indeks kinerja : Indek Reformasi Birokrasi Indek Profesionalisme SDM Indek <i>E-Government</i>
2. Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan	
3. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah	
4. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan	
5. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan	

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini, antara lain adalah: Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Hasil yang diharapkan dan kriteria keberhasilan dari pelaksanaan program ini, antara lain adalah:

	Hasil yang diharapkan	Kriteria Keberhasilan
1.	Meningkatnya ketepatan ukuran fungsi kelembagaan	Tercapainya Indek Kelembagaan Indek integritas Nasional Indek Survey Masyarakat Indek Prestasi Kepatuhan
2.	Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan	
3.	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi	
4.	Meningkatkan kinerja organisasi	
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan	

d. Penataan Tatalaksana

Tujuan dari program ini adalah untuk menyederhanakan proses manajemen melalui berbagai pendekatan termasuk penggunaan teknologi informasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Hasil yang diharapkan dan Kriteria keberhasilan dari pelaksanaan program ini, antara lain adalah:

	Hasil yang diharapkan	Kriteria Keberhasilan
1.1	Meningkatnya kecepatan berbagai berbagai proses tugas pokok dan fungsi	Tercapainya indeks kinerja: a) Indek Reformasi Birokrasi b) Indek Profesionalisme SDM c) Indek E-Government
2.	Meningkatnya efektivitas tata hubungan baik di dalam masing- masing unit kerja di lingkungan Badan Penghubung	
3.	Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja Badan Penghubung	
4.	Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran	
5.	Meningkatnya keterbukaan informasi public	
6.	Meningkatnya tata kelola mutasi pegawai	

e. Penataan Sistem Manajemen SDM

Tujuan dari program ini adalah untuk membangun dan memperkuat Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara di Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan sesuai dengan tujuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hasil yang diharapkan dan Kriteria keberhasilan dari pelaksanaan program ini, antara lain adalah:

	Hasil yang diharapkan	Kriteria Keberhasilan
1.	Tertatanya sistem pengelolaan SDM ASN	Tercapainya indeks kinerja : a) Indek Reformasi Birokrasi b) Indek Profesionalisme SDM c) Indek E-Government
2.	Meningkatnya integritas SDM ASN	
3.	Meningkatnya netralitas SDM ASN	
4.	Meningkatnya kesejahteraan SDM ASN	
5.	Meningkatnya kompetensi SDM ASN	
6.	Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai ASN	
7.	Meningkatnya ketepatan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan dengan kompetensi dan kualifikasi calon pegawai/pejabat ASN	
8.	Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN	
9.	Meningkatnya kemampuan Kemenerian Pertanian untuk penyiapan kader pimpinan yang kompeten di masing-masing instansi	

f. Penguatan Akuntabilitas

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber daya yang digunakan, serta meningkatkan kinerja organisasi.

Hasil yang diharapkan dan Kriteria keberhasilan dari pelaksanaan program, ini antara lain adalah:

	Hasil yang diharapkan	Kriteria Keberhasilan
1.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas semakin tinggi.
2.	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan	
3.	Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran	
4.	Meningkatnya transparansi	

	informasi laporan keuangan dan kinerja	
--	--	--

g. Penguatan Pengawasan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini, antara lain adalah:

	Hasil yang diharapkan	Kriteria Keberhasilan
1.	Meningkatnya sinergi pelaksanaan pengawasan internal, eksternal dan masyarakat	Tercapainya indikator Kinerja: Tercapainya Opini WTP atas laporan keuangan Tingkat Kematangan SPIP
2.	Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	
3.	Mempertahankan opini WTP	
4.	Meningkatnya pengendalian internal	
5.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih bebas KKN.	
6.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih bebas KKN	
7.	Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur	
8.	Meningkatkan Efisiensi penyelenggaraan Birokrasi	

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Hasil yang diharapkan dan Kriteria keberhasilan dari pelaksanaan program ini, antara lain:

	Hasil yang diharapkan	Kriteria Keberhasilan
1.	Meningkatnya kemudahan, kepastian dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh kementerian/lembaga dan Pemda	Tercapainya Indeks Pelayanan Publik yang berkualitas
2.	Meningkatnya aksesibilitas pelayanan	
3.	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan	

4.	Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan	
5.	Meningkatnya inovasi dalam pelayanan public	
6.	Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan	
7.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	

E. Agenda Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

1. Pelaksanaan program percepatan (*Quick Wins*), kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dan mendukung program reformasi birokrasi serta kebijakan strategis Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Rivi u agen perubahan kegiatan ini dilakukan agar agen perubahan secara aktif menerapkan tugas dan tanggungjawab dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam kerangka reformasi birokrasi.
3. Analisis organisasi secara menyeluruh dan simultan, kegiatan ini untuk ketapatan ukuran dan fungsi organisasi hal ini sangat berkaitan dengan penyempurnaan analisis jabatan dan uraian tugas jabatan dan memberikan informasi kebutuhan dan kekurangan pegawai yang berkaitan dengan formasi serta meningkatkan manajemen SDM Aparatur.
4. Penyempurnaan bisnis proses dan SOP, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan proses manajemen di lingkungan Internal Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pengembangan aflikasi e-goverment, kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dan percepatan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
6. Penyempurnaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung penetapan standar kompetensi jabatan, penilaian kinerja pegawai, perencanaan pegawai, pengalihan jabatan dan sistem pola karir pegawai.

7. Wilayah bebas korupsi untuk membangun budaya kondusif dan meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Capaian Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

Hasil capaian program dan kegiatan reformasi birokrasi Tahun 2019 meliputi antara lain:

1. Manajemen Perubahan.

- a. Menerbitkan Peraturan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/530/BADAN PENGHUBUNG-I/2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.
- b. Melaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi.
- c. Telah terbentuk agen perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/530.a/BADAN PENGHUBUNG-I/2019 tentang terbentuknya agen perubahan di Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat lebih terarah, terfokus yang memiliki peran dan tugas sebagai Katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, penghubung dan teladan di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perlu penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang ada dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran merupakan pedoman bagi pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu direvisi.

1. Penataan dan Penguatan Organisasi.

Tidak ada duplikasi dalam pelaksanaan perencanaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karenadokumen perencanaan melalui beberapa tahapan pembahasan dan sudah menggunakan aplikasi.

2. Penataan Tata Laksana.

- a.** Sudah dilakukan penyempurnaan SOP sesuai dengan peta jabatan.
- b.** Sudah dibuat peta proses Bisnis dan Peta Lintas Fungsi (Cross Functional Map/CFM) Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c.** Aplikasi sistem informasi.
- d.** Sudah dibuat klasifikasi arsip kepegawaian secara digital

3. Penataan Sistem Manajemen SDM.

- a.** Sudah disusun kebutuhan ASN per tahun maupun per 5 tahunan.
- b.** Meng update setiap perubahan data pegawai.
- c.** Sudah disusun Standar Kompetensi Jabatan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d.** Penilaian prestasi kerja telah selesai dibuat oleh seluruh pegawai Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Penguatan Akuntabilitas

- a.** Pemantauan Capaian Kinerja dilaksanakan secara triwulan melalui aplikasi e-sipenasakti
- b.** Laporan akuntabilitas secra online sudah dilaksanakan melalui Web Badan Penghubung dan Sakip Kementerian PAN RB
- c.** Pengelolaan keuangan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan dengan tertib, akuntabel, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d.** Pengelolaan keuangan Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan dengan tertib, akuntabel, transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan yang berlaku yaitu diantaranya :

- Pembukuan Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SIMDA
 - Penyetoran sisa uang APBN ke kas negara dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SIMPONI
 - Menginput PNBPN dilakukan dengan menggunakan Aplikasi TR-PNBPN
 - Pelaporan Keuangan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Simda Keuangan
 - Administrasi keuangan dikelola dengan standar akuntansi yang diikuti dengan penguatan Sistem Pengendalian Internal
 - Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DK/TP) telah dilimpahkan ke Daerah
- e.** Akuntabilitas Barang Milik Negara satker (melakukan inventarisasi BMN tingkat satker).

5. Penguatan Pengawasan

- a.** Pelantikan dan penandatanganan Pakta Integritas.
- b.** Seluruh Pejabat dari Eselon III sd Eselon IV sudah menyusun PK (Penetapan Kinerja).
- c.** Seluruh pegawai Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun LHKASN.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

- a.** Pelayanan sudah dilaksanakan pada Website Badan Penghubung
- b.** Penyediaan kotak pengaduan bagi masyarakat

7. Program percepatan RB/Quick Wins

- a.** Penerapan program gerakan revolusi mental mulai diinternalisasikan

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



ARIE PRIMAJAYA, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19751231 200312 1 007